

DAFTAR PUSTAKA

- Rahel Angel Rosalin Silaban. (2018) *penerapan standar operasional prosedur pada pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan dipelabuhan perikanan samudra cilacap, jawa tengah*
- Ameliawati. (2018) *penerapan standar operasional prosedur di syahbandar pelabuhan perikanan samudra bungus, sumatera barat*
- Atmoko, T. (2009) *standar operasional prosedur dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*
- Siti Malihah, *Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2018*
- Rahel Angel Rosalin Silaban, *Fakultas perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, 2018*
- Mandala, E., Setyadiharja. R. 2016. *Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jurnal Ilmu Pemerintahan.1:248-265.*
- Nancy Damayanti. (2016) *analisa kualitas pelayanan jasa penumpang angkutan laut di unit pelaksanaan teknis pos lintas batas laut liem hie djung, kabupaten nunukan*
- Tambunan, Rudi M, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), Jakarta: Maistas Publishing*
- (Wijaya & Irawan, 2018) *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP),*
- Sinambela, Lukman. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara*
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.*
- Moenir. 2015, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara*
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran, Terjemahan : Bob Sabran. Edisi 13 Jilid 1. Erlangga, Jakarta.*

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: *Modern English Perss*, 2002), h.1598

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: *PT Raja Gravindo Persada*

Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: *Remaja Rosdakarya Offset*

Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 :5), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: *Balai Pustaka*

Peraturan Menteri Perhubungan 82 Tahun 2014 *tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar*

UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 *Tentang setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.*

UU No 6 Tahun 2018.Pasal 1 *Tentang Kekarantinaan Kesehatan*

Undang – undang No. 6 Tahun 2011 *tentang Keimigrasian*.Menurut Pasal 1 angka 1 *UU Keimigrasian,*

Permen KP No.32 Tahun 2014 *Tentang Penerbitan SPB*